

Institutional Trust as a Mediator between Political Efficacy and Voter Participation

(Kepercayaan Institusional sebagai Mediator antara Efikasi Politik dan Partisipasi Pemilih)

Robby Effendi ^{a,1}, Suaidah Lubis ^{a,2*}, Anggi Mutia Dewi ^{a,3}, Tania Salsabila Hasibuan ^{a,4}, Dwi Putri ^{a,5}, Fransisca Mularia ^{a,6}

^a Magister Psikologi, Universitas Medan Area, Medan, Indonesia

E-mail: ¹251804003@student.uma.ac.id; ²suaidah@staff.uma.ac.id; ³251804018@student.uma.ac.id; ⁴251804054@student.uma.ac.id; ⁵251804048@student.uma.ac.id; ⁶251804039@student.uma.ac.id

***Corresponding Author:** suaidah@staff.uma.ac.id (S. Lubis).

ARTICLE INFO

Received: 24 June 2026
Revised: 06 July 2026
Accepted: 15 July 2026

How to Cite:

Effendi, R., Lubis, S., Dewi, A. M., Hasibuan, T. S., Putri, D., & Mularia, F. (2026). Institutional Trust as a Mediator between Political Efficacy and Voter Participation. *Jurnal IPTEK Bagi Masyarakat*, 6(1), 232–240.
<https://doi.org/10.55537/j-ibm.v6i1.1771>

ABSTRACT

This study examines institutional trust as a mediator between political efficacy and voter participation after the 2024 local election in Medan, Indonesia. A quantitative cross-sectional correlational design was used with 275 voters selected through convenience sampling. Data were collected through an online survey measuring political efficacy, institutional trust in the General Elections Commission (KPU), and voter participation. Pearson correlations and mediation analysis with 5,000 bootstrap resamples were applied. The results showed positive associations among all variables. Institutional trust significantly mediated the association between political efficacy and voter participation ($B = 0.11$, $SE = 0.03$, 95% CI [0.06, 0.17]) and accounted for 20.5% of the total association, while the direct association remained significant ($B = 0.42$, 95% CI [0.31, 0.53]). These findings indicate partial mediation: citizens' confidence in their political competence is associated with participation both directly and through their evaluation of electoral institutional credibility. The study highlights institutional trust as an evaluative mechanism in local democratic participation and recommends strengthening political literacy, transparent election administration, and accessible public communication.

Keywords:

Institutional trust; local elections; political efficacy; political participation; voter behavior.

ABSTRAK

Penelitian ini menguji kepercayaan institusional sebagai mediator antara efikasi politik dan partisipasi pemilih setelah Pilkada 2024 di Kota Medan. Penelitian menggunakan desain kuantitatif korelasional potong lintang dengan 275 pemilih yang dipilih melalui convenience sampling. Data dikumpulkan melalui survei daring yang mengukur efikasi politik, kepercayaan terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan partisipasi pemilih. Analisis dilakukan menggunakan korelasi Pearson dan analisis mediasi dengan 5.000 sampel ulang bootstrap. Hasil menunjukkan hubungan positif antarseluruh variabel. Kepercayaan institusional memediasi secara signifikan hubungan efikasi politik dan partisipasi pemilih ($B = 0,11$; $SE = 0,03$; 95% CI [0,06, 0,17]) serta menjelaskan 20,5% hubungan total, sedangkan hubungan langsung tetap signifikan ($B = 0,42$; 95% CI [0,31, 0,53]). Temuan ini menunjukkan mediasi parsial: keyakinan warga terhadap kompetensi politiknya berkaitan dengan partisipasi secara langsung dan melalui penilaian atas kredibilitas institusi elektoral. Penelitian menegaskan kepercayaan institusional sebagai mekanisme evaluatif dalam demokrasi lokal dan merekomendasikan penguatan literasi politik, transparansi penyelenggaraan pemilu, serta komunikasi publik yang mudah diakses.

Kata kunci:

Efikasi politik; kepercayaan institusional; partisipasi pemilih; perilaku pemilih; Pilkada.

Pendahuluan

Dalam demokrasi Indonesia, pemilihan kepala daerah (Pilkada) merupakan ruang penting bagi warga untuk menyalurkan kedaulatan politik pada tingkat lokal. Melalui Pilkada, masyarakat tidak hanya memilih kepala

daerah, tetapi juga menilai sejauh mana proses politik lokal mampu menghadirkan pemerintahan yang akuntabel, responsif, dan dipercaya publik. Pelaksanaan Pilkada 2024 menjadi konteks penting untuk membaca kembali dinamika partisipasi warga setelah pandemi, terutama di tengah perubahan komposisi pemilih, meningkatnya peran pemilih muda, serta semakin kuatnya penggunaan media digital dalam membentuk informasi dan percakapan politik (Arrazak & Adnan, 2025).

Partisipasi politik dalam konteks kontemporer tidak dapat dipahami hanya sebagai kehadiran pemilih di tempat pemungutan suara. Keterlibatan warga juga mencakup pencarian informasi politik, pembentukan opini, diskusi politik, interaksi dalam ruang digital, serta intensi untuk tetap berpartisipasi pada pemilihan berikutnya (Chen et al., 2019; Boulianne, 2019). Oleh karena itu, partisipasi pemilih dalam penelitian ini dipahami sebagai konstruk yang lebih luas daripada tindakan memilih semata. Partisipasi merujuk pada keterlibatan elektoral dan pasca-elektoral yang meliputi penggunaan hak pilih, akses terhadap informasi politik, diskusi mengenai isu politik, keterlibatan dalam percakapan daring maupun luring, serta kecenderungan untuk kembali menggunakan hak politik pada Pilkada berikutnya.

Dari perspektif psikologi sosial-politik, partisipasi pemilih dapat dipahami sebagai hasil keterkaitan antara aspek kognitif, evaluatif, dan perilaku. Efikasi politik merepresentasikan aspek kognitif karena berkaitan dengan keyakinan individu bahwa dirinya mampu memahami isu publik dan memiliki kapasitas untuk terlibat dalam proses politik (Reichert, 2016; Chang, 2023). Individu dengan efikasi politik yang lebih tinggi cenderung lebih aktif mencari informasi, berdiskusi, serta merasa memiliki keterhubungan dengan proses demokrasi (Ardévol-Abreu et al., 2019). Penelitian sebelumnya juga menunjukkan bahwa efikasi politik berasosiasi dengan berbagai bentuk partisipasi politik, baik dalam penggunaan hak pilih, diskusi politik, maupun keterlibatan warga dalam isu publik (McDonnell, 2020; Mashud et al., 2023; Mulyawan et al., 2024; Praha & Rachma, 2023).

Selain efikasi politik, kepercayaan institusional merupakan komponen evaluatif yang penting dalam menjelaskan partisipasi pemilih. Kepercayaan institusional menggambarkan penilaian warga terhadap kredibilitas, integritas, transparansi, dan keadilan lembaga politik atau penyelenggara pemilu (Suryahadi et al., 2023). Dalam konteks Pilkada, kepercayaan terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU) menjadi relevan karena warga menilai apakah proses elektoral dijalankan secara jujur, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan (Bakar et al., 2022). Kepercayaan politik juga dapat dipahami sebagai konstruk multidimensional yang mencakup dimensi penilaian yang berbeda, termasuk kompetensi dan komitmen institusi (Guan, 2026). Dengan demikian, kepercayaan institusional dalam penelitian ini tidak dimaknai secara umum, melainkan secara spesifik sebagai penilaian pemilih terhadap kredibilitas KPU sebagai penyelenggara pemilu.

Hubungan antara efikasi politik, kepercayaan institusional, dan partisipasi pemilih menunjukkan pola yang kompleks. Warga yang merasa mampu memahami politik cenderung lebih siap mengevaluasi lembaga politik dan proses elektoral, sedangkan kepercayaan terhadap institusi dapat memengaruhi cara warga memaknai relevansi keterlibatan politik. Literatur menunjukkan bahwa efikasi dan kepercayaan politik saling berkaitan, tetapi arah dan kekuatannya dapat berbeda menurut dimensi efikasi dan konteks institusional (Bienstman et al., 2024; Kestilä-Kekkonen et al., 2022). Kajian lain menunjukkan bahwa efikasi dan kepercayaan dapat bekerja bersama dalam menjelaskan partisipasi politik (Wang & Zhang, 2024). Kepercayaan politik selanjutnya berasosiasi dengan partisipasi, meskipun pola tersebut bervariasi menurut bentuk partisipasi dan konteks (Boulianne, 2019; Devine, 2024; Ouattara & Steenvoorden, 2024; van Alebeek et al., 2026).

Dalam konteks urban seperti Medan, keterkaitan tersebut menjadi penting untuk ditelaah karena ruang informasi politik semakin dipengaruhi media sosial dan jaringan digital, terutama pada kelompok pemilih muda (Arrazak & Adnan, 2025; Ida et al., 2025). Namun, akses informasi yang luas tidak selalu menghasilkan kepercayaan yang tinggi. Warga yang merasa kompeten secara politik dapat menjadi lebih kritis terhadap institusi, sehingga hubungan antara efikasi dan kepercayaan perlu dipahami sebagai hubungan psikologis yang tidak selalu linear (Kestilä-Kekkonen et al., 2022). Dalam situasi tertentu, kepercayaan yang rendah bahkan dapat mendorong bentuk partisipasi non-konvensional atau keterlibatan politik sebagai respons terhadap ketidakpuasan (Fitz & Saunders, 2024; Granados & Sánchez, 2026). Karena itu, penelitian tentang partisipasi pemilih perlu membedakan bentuk partisipasi yang dikaji serta menjelaskan konteks institusional tempat partisipasi tersebut berlangsung.

Secara teoretis, hubungan antara efikasi politik, kepercayaan institusional, dan partisipasi pemilih dapat dirumuskan sebagai lintasan kognitif-evaluatif-perilaku. Efikasi politik menjadi dasar kognitif yang berkaitan dengan kemampuan dan keyakinan individu dalam memahami politik; kepercayaan institusional menjadi mekanisme evaluatif yang mencerminkan penilaian terhadap kredibilitas penyelenggara pemilu; sedangkan partisipasi pemilih menjadi ekspresi perilaku dari keterlibatan politik warga (Reichert, 2016; Suryahadi et al., 2023; Mashud et al., 2023). Model ini sejalan dengan kajian psikologi politik yang menempatkan partisipasi bukan hanya sebagai tindakan elektoral, tetapi juga sebagai hasil dari proses psikologis yang melibatkan keyakinan diri, evaluasi terhadap sistem, dan persepsi terhadap kebermaknaan tindakan politik.

Berdasarkan kerangka tersebut, penelitian ini menguji model mediasi statistik dengan menempatkan kepercayaan institusional terhadap KPU sebagai jalur psikologis yang menghubungkan efikasi politik dan partisipasi pemilih. Medan dipilih sebagai konteks penelitian karena penelitian ini berfokus pada dinamika pemilih di lingkungan perkotaan setelah Pilkada 2024. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur psikologi politik di Indonesia dengan menunjukkan bahwa partisipasi pemilih lokal tidak hanya berkaitan dengan

preferensi politik, tetapi juga dengan proses kognitif dan evaluatif yang membentuk cara warga memahami, menilai, dan menjalankan keterlibatan politiknya (Denemark & Niemi, 2012; Suryanagara et al., 2025).

Dengan mempertimbangkan desain penelitian yang bersifat korelasional dan potong lintang, hipotesis penelitian dirumuskan secara hati-hati sebagai berikut:

H1: Efikasi politik berasosiasi positif dengan kepercayaan institusional.

H2: Kepercayaan institusional berasosiasi positif dengan partisipasi pemilih.

H3: Kepercayaan institusional memediasi secara statistik hubungan antara efikasi politik dan partisipasi pemilih.

Metode

Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain survei korelasional potong lintang. Desain ini dipilih karena sesuai untuk menguji keterkaitan statistik antarvariabel psikologis serta memeriksa peran mediasi dalam konteks perilaku sosial-politik (Hayes, 2018; Preacher & Hayes, 2008). Karena data dikumpulkan pada satu titik waktu, model mediasi dalam penelitian ini dipahami sebagai model mediasi statistik, bukan sebagai bukti kausalitas langsung. Dengan demikian, istilah yang digunakan dalam analisis dan interpretasi diarahkan pada “asosiasi”, “hubungan”, atau “prediksi statistik” antarvariabel.

Model penelitian menempatkan efikasi politik sebagai variabel prediktor, kepercayaan institusional sebagai mediator, dan partisipasi pemilih sebagai variabel kriteria. Kepercayaan institusional secara khusus merujuk pada penilaian responden terhadap kredibilitas, transparansi, dan integritas Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara pemilu. Model ini digunakan untuk menguji apakah kepercayaan institusional secara statistik menjembatani hubungan antara efikasi politik dan partisipasi pemilih (Wang, 2016; Acar & Uluğ, 2022).

Partisipan

Penelitian ini melibatkan 275 warga Kota Medan yang telah menggunakan hak pilih pada Pilkada 2024. Pengambilan sampel dilakukan secara non-probabilitas melalui convenience sampling, yaitu teknik pengambilan sampel berdasarkan ketersediaan dan kesediaan responden untuk berpartisipasi dalam penelitian (Etikan et al., 2016). Kriteria inklusi penelitian mencakup: (1) berdomisili di Kota Medan, (2) berusia minimal 17 tahun atau telah memenuhi syarat sebagai pemilih, dan (3) menggunakan hak pilih pada Pilkada 2024.

Pemilihan responden yang telah menggunakan hak pilih dilakukan karena penelitian ini berfokus pada keterlibatan pemilih setelah mengikuti proses elektoral, bukan pada perbandingan antara pemilih dan non-pemilih. Oleh karena itu, partisipasi pemilih dalam penelitian ini tidak dibatasi pada tindakan hadir di TPS, tetapi mencakup keterlibatan elektoral dan pasca-elektoral, seperti penggunaan hak pilih, pencarian informasi politik, diskusi politik, keterlibatan dalam percakapan politik daring maupun luring, serta intensi untuk berpartisipasi kembali pada Pilkada berikutnya. Konsekuensinya, generalisasi hasil penelitian kepada warga yang tidak menggunakan hak pilih perlu dilakukan secara hati-hati karena kelompok tersebut tidak termasuk dalam sampel penelitian.

Karakteristik demografis menunjukkan bahwa sebagian besar partisipan berada pada rentang usia 17–35 tahun, dengan tingkat pendidikan menengah hingga tinggi. Komposisi tersebut menggambarkan profil sampel penelitian, bukan representasi seluruh populasi pemilih Kota Medan. Penggunaan survei daring dan convenience sampling juga berpotensi menghasilkan keterwakilan yang lebih kuat pada kelompok pemilih muda dan pengguna aktif media digital sehingga generalisasi hasil perlu dilakukan secara hati-hati.

Prosedur

Pengumpulan data dilakukan secara daring melalui Google Forms selama dua minggu pada awal tahun 2026. Kuesioner disebarkan melalui pesan pribadi, grup media sosial, dan jaringan interpersonal partisipan. Karena survei daring rentan terhadap respons satisficing dan variasi kualitas jawaban, kualitas respons diperiksa kembali pada tahap pembersihan data (Miura & Kobayashi, 2021).

Partisipasi responden bersifat sukarela dan anonim. Sebelum mengisi kuesioner, responden memperoleh informasi mengenai tujuan penelitian, kriteria partisipasi, kerahasiaan data, serta hak untuk tidak melanjutkan pengisian kuesioner. Persetujuan partisipasi diberikan melalui informed consent digital sesuai dengan prinsip etika penelitian sosial (American Psychological Association [APA], 2020). Tidak ada data identitas pribadi yang digunakan dalam analisis.

Persiapan Instrumen dan Pilot Test

Sebelum pengumpulan data utama, instrumen penelitian diuji coba kepada 30 responden untuk menilai kejelasan redaksi item, reliabilitas awal, dan kesesuaian item dengan konstruk yang diukur. Hasil pilot test menunjukkan reliabilitas awal yang bervariasi pada tiap konstruk, yaitu efikasi politik ($\alpha = 0.78$), partisipasi pemilih ($\alpha = 0.63$), dan kepercayaan institusional ($\alpha = 0.53$). Nilai reliabilitas yang belum optimal pada konstruk kepercayaan institusional menjadi dasar untuk melakukan penyempurnaan minor pada redaksi item agar pernyataan lebih jelas, tidak ambigu, dan tetap konsisten dengan definisi konseptual kepercayaan terhadap penyelenggara pemilu.

Penyempurnaan instrumen dilakukan tanpa mengubah model konseptual penelitian. Pada tahap ini, satu item kepercayaan yang dinilai kurang berkontribusi terhadap konsistensi konstruk dihapus. Proses refinement menghasilkan 20 item final yang digunakan dalam pengumpulan data utama. Keputusan mempertahankan konstruk efikasi politik dan partisipasi pemilih didasarkan pada kekuatan landasan teoretis, sedangkan kualitas instrumen pada data utama dievaluasi melalui Cronbach's alpha dan pola korelasi antarkonstruk.

Instrumen

Instrumen penelitian mengukur tiga konstruk psikologis, yaitu efikasi politik, kepercayaan institusional, dan partisipasi pemilih. Instrumen awal terdiri dari 21 item, masing-masing tujuh item untuk setiap konstruk. Untuk meminimalkan acquiescence bias, beberapa item disusun dalam format reverse. Setelah proses pilot test dan refinement, instrumen final terdiri dari 20 item dengan empat item reverse yang dipertahankan.

Efikasi politik diukur melalui item yang menilai keyakinan responden bahwa dirinya mampu memahami isu publik, mengikuti informasi politik, dan merasa memiliki kapasitas untuk berperan dalam proses demokrasi (Niemi et al., 1991; Reichert, 2016). Kepercayaan institusional diukur melalui item yang menilai persepsi responden terhadap kredibilitas, transparansi, integritas, dan keadilan KPU sebagai penyelenggara pemilu, dengan merujuk pada kerangka kepercayaan politik dan kepercayaan terhadap institusi (Easton, 1975; Suryahadi et al., 2023). Partisipasi pemilih diukur melalui item yang mencakup penggunaan hak pilih, pencarian informasi politik, diskusi politik, keterlibatan dalam percakapan politik daring atau luring, serta intensi berpartisipasi pada Pilkada berikutnya (Chen et al., 2019; Mashud et al., 2023).

Contoh item reverse mencakup pernyataan yang menyiratkan keraguan terhadap kemampuan memahami politik atau efektivitas partisipasi politik, seperti "politik terlalu rumit bagi warga seperti saya" dan "partisipasi saya tidak membawa perubahan berarti". Seluruh item menggunakan skala Likert lima poin, mulai dari 1 = sangat tidak setuju sampai 5 = sangat setuju. Sebelum analisis, item reverse diberi skor ulang agar arah skor konsisten, yaitu skor yang lebih tinggi menunjukkan efikasi politik, kepercayaan institusional, dan partisipasi pemilih yang lebih tinggi.

Pengujian kualitas instrumen dilakukan pada data utama. Reliabilitas internal diperiksa menggunakan Cronbach's alpha, sedangkan validitas konstruk dievaluasi secara terbatas melalui kesesuaian teoretis item dan pola korelasi antarkonstruk. Karena penelitian ini tidak melaporkan confirmatory factor analysis, average variance extracted, composite reliability, McDonald's omega, dan corrected item-total correlation, interpretasi kualitas model pengukuran dibatasi pada indikator yang tersedia (Hair et al., 2021; Taber, 2018).

Pembersihan Data

Sebelum analisis, data diperiksa untuk memastikan kualitas respons. Proses pembersihan data mencakup verifikasi kriteria inklusi, pemeriksaan domisili responden, pengecekan kelengkapan jawaban, pemeriksaan item reverse, serta identifikasi pola respons yang tidak valid. Respons dikeluarkan apabila responden tidak berdomisili di Kota Medan, tidak memenuhi kriteria sebagai pemilih dalam Pilkada 2024, atau menunjukkan pola jawaban yang tidak wajar, misalnya memberikan respons identik pada seluruh item.

Data dari pilot test ($n = 30$) tidak digabungkan dengan data utama dan hanya digunakan untuk evaluasi awal instrumen. Pada pengumpulan data utama diperoleh 332 respons. Setelah proses penyaringan, sebanyak 57 respons dikeluarkan karena tidak memenuhi kriteria inklusi atau menunjukkan pola respons yang tidak valid. Dengan demikian, 275 respons dinyatakan memenuhi kriteria dan digunakan dalam analisis lanjutan.

Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan menggunakan Jamovi 2.6. Tahap analisis meliputi statistik deskriptif, pemeriksaan reliabilitas internal, analisis korelasi Pearson, dan analisis mediasi. Statistik deskriptif digunakan untuk menggambarkan rerata, simpangan baku, dan kecenderungan skor pada masing-masing konstruk. Reliabilitas internal dievaluasi menggunakan Cronbach's alpha. Nilai alpha diinterpretasikan secara hati-hati karena koefisien ini dapat dipengaruhi oleh jumlah item, homogenitas indikator, dan karakteristik konstruk yang diukur (Taber, 2018).

Hubungan antarvariabel diuji menggunakan korelasi Pearson. Selanjutnya, model mediasi diuji melalui path analysis dengan bootstrapping 5.000 resampling untuk memperoleh estimasi efek tidak langsung dan interval kepercayaan. Bootstrapping digunakan karena metode ini direkomendasikan untuk menguji efek mediasi, terutama ketika distribusi efek tidak langsung tidak selalu normal (Hayes, 2018; Preacher & Hayes, 2008). Pelaporan hasil mediasi membedakan koefisien tidak terstandar (B) dan koefisien terstandar (β), serta mencantumkan standard error, p-value, confidence interval 95%, efek langsung, efek tidak langsung, efek total, persentase mediasi, dan nilai R^2 . Taraf signifikansi ditetapkan pada $p < .05$.

Analisis model pengukuran dibatasi pada reliabilitas internal dan pola korelasi antarkonstruk. Oleh karena itu, hasil penelitian tidak digunakan untuk membuat klaim berlebihan mengenai validitas konstruk, melainkan ditafsirkan sebagai hubungan antarskor konstruk berdasarkan indikator yang tersedia.

Hasil

Penelitian ini menganalisis data dari 275 warga Kota Medan yang telah menggunakan hak pilih pada Pilkada

2024. Mayoritas responden berada pada rentang usia 17–35 tahun dan memiliki tingkat pendidikan menengah hingga tinggi. Karena sampel hanya mencakup responden yang telah menggunakan hak pilih dan direkrut melalui convenience sampling daring, hasil penelitian ini terutama menjelaskan variasi partisipasi elektoral dan pasca-elektoral di antara pemilih aktif dalam sampel, bukan perbandingan antara pemilih dan non-pemilih atau estimasi yang mewakili seluruh populasi pemilih Kota Medan.

Analisis Deskriptif dan Reliabilitas

Analisis deskriptif menunjukkan bahwa ketiga konstruk berada pada kategori sedang hingga relatif tinggi. Rerata tertinggi terdapat pada partisipasi pemilih ($M = 3.71$; $SD = 0.58$), diikuti oleh efikasi politik ($M = 3.59$; $SD = 0.60$), dan kepercayaan institusional ($M = 3.20$; $SD = 0.77$). Pola ini menunjukkan bahwa responden cenderung memiliki tingkat partisipasi dan efikasi politik yang relatif lebih tinggi dibandingkan penilaian mereka terhadap kepercayaan institusional.

Tabel 1. Statistik Deskriptif Konstruk

Konstruk	Mean	SD
Efikasi	3.59	0.60
Kepercayaan	3.20	0.77
Partisipasi	3.71	0.58

Uji reliabilitas menunjukkan bahwa kepercayaan institusional memiliki konsistensi internal yang dapat diterima ($\alpha = 0.71$). Sementara itu, efikasi politik ($\alpha = 0.60$) dan partisipasi pemilih ($\alpha = 0.63$) menunjukkan reliabilitas marginal. Oleh karena itu, kedua konstruk tersebut tidak dinyatakan memiliki reliabilitas ideal. Konstruk tetap dipertahankan karena memiliki dasar teoretis yang kuat dalam model psikologi politik serta menunjukkan korelasi positif dan signifikan dengan konstruk lain dalam model. Namun, hasil yang melibatkan efikasi politik dan partisipasi pemilih perlu ditafsirkan secara hati-hati.

Tabel 2. Reliabilitas Konstruk

Konstruk	Cronbach's Alpha
Efikasi	0.60
Kepercayaan	0.71
Partisipasi	0.63

Evaluasi Model Pengukuran

Evaluasi model pengukuran dilakukan secara terbatas melalui reliabilitas internal dan konsistensi arah korelasi antarkonstruk. Hasil belum dapat diperlakukan sebagai bukti final mengenai validitas konstruk karena confirmatory factor analysis (CFA), average variance extracted (AVE), composite reliability (CR), McDonald's omega, dan corrected item-total correlation tidak dilaporkan. Dengan demikian, temuan ditafsirkan sebagai hubungan antarskor konstruk, bukan sebagai validasi menyeluruh atas model pengukuran.

Analisis Korelasi

Korelasi Pearson menunjukkan bahwa ketiga konstruk memiliki hubungan positif dan signifikan. Efikasi politik berkorelasi positif dengan kepercayaan institusional ($r = 0.483$; $p < 0.001$), efikasi politik berkorelasi positif dengan partisipasi pemilih ($r = 0.551$; $p < 0.001$), dan kepercayaan institusional berkorelasi positif dengan partisipasi pemilih ($r = 0.446$; $p < 0.001$). Temuan ini menunjukkan bahwa responden dengan efikasi politik yang lebih tinggi cenderung memiliki kepercayaan institusional yang lebih tinggi dan partisipasi pemilih yang lebih tinggi. Hasil korelasi ini juga memberikan dasar statistik untuk menguji model mediasi.

Tabel 3. Korelasi Antar Konstruk

Konstruk	1	2	3
1. Efikasi	—		
2. Kepercayaan	0.48***	—	
3. Partisipasi	0.55***	0.45***	—

*** $p < 0.001$

Analisis Jalur

Analisis jalur dilakukan untuk menguji hubungan statistik antara efikasi politik, kepercayaan institusional, dan partisipasi pemilih. Hasil menunjukkan bahwa efikasi politik berasosiasi positif dengan kepercayaan institusional ($B = 0.61$; $SE = 0.07$; 95% CI [0.47, 0.74]; $p < 0.001$; $\beta = 0.48$). Efikasi politik menjelaskan 23.3% varians kepercayaan institusional ($R^2 = 0.233$).

Kepercayaan institusional juga berasosiasi positif dengan partisipasi pemilih setelah efikasi politik dimasukkan ke dalam model ($B = 0.18$; $SE = 0.04$; 95% CI [0.09, 0.27]; $p < 0.001$; $\beta = 0.24$). Selain itu, efikasi politik tetap berasosiasi positif dengan partisipasi pemilih setelah memperhitungkan kepercayaan institusional ($B = 0.42$; $SE = 0.06$; 95% CI [0.31, 0.53]; $p < 0.001$; $\beta \approx 0.43$). Secara bersama-sama, efikasi politik dan kepercayaan institusional menjelaskan 34.6% varians partisipasi pemilih ($R^2 = 0.346$). Pola ini menunjukkan bahwa kepercayaan institusional berperan sebagai mediator parsial, karena hubungan langsung antara efikasi politik dan partisipasi pemilih tetap signifikan setelah mediator dimasukkan ke dalam model.

Tabel 4. Estimasi Jalur Mediasi

Jalur	B	SE	95% CI	p	β
Efikasi politik → Kepercayaan institusional	0.61	0.07	[0.47, 0.74]	< 0.001	≈ 0.48
Kepercayaan institusional → Partisipasi pemilih	0.18	0.04	[0.09, 0.27]	< 0.001	≈ 0.24
Efikasi politik → Partisipasi pemilih	0.42	0.06	[0.31, 0.53]	< 0.001	≈ 0.43

Estimasi Efek Mediasi

Pengujian mediasi dengan bootstrapping 5.000 resampling menunjukkan bahwa efek tidak langsung efikasi politik terhadap partisipasi pemilih melalui kepercayaan institusional signifikan secara statistik ($B = 0.11$; $SE = 0.03$; 95% CI [0.06, 0.17]). Karena interval kepercayaan tidak melewati nol, efek mediasi dapat dinyatakan signifikan. Efek langsung efikasi politik terhadap partisipasi pemilih juga tetap signifikan ($B = 0.42$; $SE = 0.06$; 95% CI [0.31, 0.53]), sedangkan efek total sebesar $B = 0.53$ ($SE = 0.05$; 95% CI [0.44, 0.62]).

Proporsi mediasi menunjukkan bahwa 20.5% hubungan statistik antara efikasi politik dan partisipasi pemilih dijelaskan melalui kepercayaan institusional, sedangkan 79.5% tetap berlangsung melalui jalur langsung. Dengan demikian, model ini mendukung mediasi parsial, bukan mediasi penuh.

Tabel 5. Estimasi Efek Mediasi

Efek	Estimasi	SE	95% CI	p	% Mediasi
Tidak langsung	0.11	0.03	[0.06, 0.17]	< 0.001	20.5
Langsung	0.42	0.06	[0.31, 0.53]	< 0.001	79.5
Total	0.53	0.05	[0.44, 0.62]	< 0.001	100.0

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa efikasi politik, kepercayaan institusional, dan partisipasi pemilih saling berhubungan secara positif. Efikasi politik berhubungan dengan partisipasi pemilih baik secara langsung maupun tidak langsung melalui kepercayaan institusional. Namun, karena penelitian ini menggunakan desain korelasional potong lintang, hasil tersebut perlu dipahami sebagai hubungan statistik antarvariabel, bukan sebagai bukti kausalitas.

Diskusi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa efikasi politik, kepercayaan institusional, dan partisipasi pemilih memiliki hubungan positif dalam konteks demokrasi lokal pasca-Pilkada 2024. Efikasi politik berasosiasi positif dengan kepercayaan institusional dan partisipasi pemilih, sedangkan kepercayaan institusional juga berasosiasi positif dengan partisipasi pemilih. Temuan ini mendukung kerangka psikologi sosial-politik yang memandang keterlibatan politik sebagai proses yang melibatkan dimensi kognitif, evaluatif, dan perilaku (Reichert, 2016; Mashud et al., 2023). Dalam kerangka tersebut, efikasi politik merepresentasikan keyakinan kognitif warga mengenai kemampuan memahami isu publik dan menjalankan peran politik, kepercayaan institusional merepresentasikan evaluasi terhadap kredibilitas penyelenggara pemilu, sedangkan partisipasi pemilih merepresentasikan bentuk keterlibatan elektoral dan pasca-elektoral.

Hubungan positif antara efikasi politik dan partisipasi pemilih menunjukkan bahwa responden yang merasa lebih mampu memahami politik cenderung lebih terlibat dalam aktivitas politik. Keterlibatan ini tidak hanya berkaitan dengan penggunaan hak pilih, tetapi juga dengan pencarian informasi politik, diskusi politik, keterlibatan dalam percakapan daring atau luring, dan intensi untuk kembali berpartisipasi pada Pilkada berikutnya. Temuan ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa efikasi politik berkaitan dengan peningkatan partisipasi warga, baik dalam bentuk partisipasi elektoral maupun keterlibatan politik sehari-hari (Ardèvol-Abreu et al., 2019; Chen et al., 2019; McDonnell, 2020; Ouattara & Steenvoorden, 2024). Dengan demikian, efikasi politik dapat dipahami sebagai sumber daya psikologis yang membuat warga merasa bahwa politik dapat dipahami, diikuti, dan direspons melalui tindakan partisipatif.

Temuan bahwa efikasi politik berasosiasi positif dengan kepercayaan institusional menunjukkan bahwa kedua konstruk bergerak searah dalam sampel penelitian. Namun, karena desain penelitian bersifat korelasional potong lintang, arah hubungan tersebut tidak dapat ditetapkan secara kausal. Literatur menunjukkan bahwa efikasi dan kepercayaan politik dapat saling berkaitan, tetapi pola hubungannya bergantung pada dimensi efikasi dan konteks institusional (Bienstman et al., 2024; Kestilä-Kekkonen et al., 2022). Kajian lain juga menunjukkan bahwa efikasi dan kepercayaan dapat berinteraksi dalam menjelaskan partisipasi politik (Wang & Zhang, 2024). Dengan demikian, temuan penelitian ini lebih tepat dibaca sebagai asosiasi statistik yang konsisten dengan hubungan teoretis antarkonstruk, bukan sebagai bukti bahwa efikasi politik menyebabkan peningkatan kepercayaan institusional.

Hasil mediasi menunjukkan bahwa kepercayaan institusional berperan sebagai mediator parsial dalam hubungan antara efikasi politik dan partisipasi pemilih. Efek tidak langsung melalui kepercayaan institusional signifikan, tetapi proporsinya hanya sekitar 20.5% dari hubungan total. Sebagian besar hubungan efikasi politik dengan partisipasi pemilih tetap berlangsung melalui jalur langsung. Pola ini menunjukkan bahwa kepercayaan terhadap KPU memang menjadi salah satu jalur psikologis yang menghubungkan efikasi dengan partisipasi, tetapi bukan satu-satunya mekanisme yang menjelaskan keterlibatan pemilih.

Mediasi parsial tersebut dapat dijelaskan melalui karakter efikasi politik sebagai keyakinan internal yang langsung berhubungan dengan tindakan politik. Individu yang merasa mampu memahami isu politik dan menilai pilihan politik dapat tetap aktif berpartisipasi meskipun tingkat kepercayaannya terhadap institusi belum sepenuhnya kuat. Dalam situasi seperti ini, partisipasi tidak hanya muncul karena warga percaya pada lembaga pemilu, tetapi juga karena mereka memiliki keyakinan bahwa keterlibatan politik adalah bagian dari kapasitas dan tanggung jawab warga. Dengan kata lain, efikasi politik dapat membuat pemilih tetap mencari informasi, berdiskusi, dan menggunakan hak politiknya karena mereka merasa memiliki kemampuan untuk membaca proses politik dan mengambil keputusan secara mandiri.

Temuan ini penting karena memperlihatkan bahwa kepercayaan institusional bekerja sebagai mekanisme evaluatif, bukan sebagai pengganti efikasi politik. Kepercayaan terhadap KPU dapat memperkuat makna partisipasi karena warga melihat proses elektoral sebagai prosedur yang kredibel, transparan, dan layak diikuti. Akan tetapi, ketika kepercayaan tersebut tidak sepenuhnya tinggi, efikasi politik masih dapat menopang keterlibatan pemilih melalui jalur langsung. Literatur menunjukkan bahwa hubungan kepercayaan politik dan partisipasi bersifat kompleks: kepercayaan dapat berkaitan dengan partisipasi institusional seperti voting, sedangkan dalam konteks tertentu kepercayaan rendah juga dapat berkaitan dengan bentuk partisipasi lain sebagai respons terhadap ketidakpuasan politik (Devine, 2024; Fitz & Saunders, 2024; Granados & Sánchez, 2026; Ouattara & Steenvoorden, 2024).

Dalam konteks urban seperti Medan, pola tersebut dapat dipahami melalui karakter pemilih yang relatif terhubung dengan media digital dan jejaring informasi politik. Akses terhadap informasi politik, diskusi daring, dan percakapan dalam komunitas sosial dapat memperkuat efikasi politik sekaligus membentuk penilaian terhadap penyelenggara pemilu (Arrazak & Adnan, 2025; Ida et al., 2025). Pada kelompok pemilih urban, partisipasi politik tidak hanya berlangsung pada hari pemungutan suara, tetapi juga melalui konsumsi informasi, pembentukan opini, verifikasi informasi, serta percakapan politik di ruang digital. Karena itu, partisipasi pemilih dalam penelitian ini perlu dibaca sebagai keterlibatan yang lebih luas daripada tindakan memilih semata.

Temuan ini juga menunjukkan bahwa partisipasi pemilih tidak sepenuhnya dapat dijelaskan melalui kepercayaan institusional. Literatur terbaru menegaskan bahwa kepercayaan politik merupakan konstruk yang multidimensional dan dinamis. Kepercayaan dapat berkaitan dengan penilaian atas kompetensi, komitmen, integritas, dan responsivitas institusi, serta dapat berubah mengikuti pengalaman politik warga (Stals et al., 2025; Guan, 2026; van Alebeek et al., 2026). Oleh karena itu, dalam konteks Pilkada, kepercayaan terhadap KPU sebagai penyelenggara pemilu perlu terus dibangun melalui transparansi prosedur, komunikasi publik yang jelas, akuntabilitas data, dan respons terhadap keraguan masyarakat.

Secara teoretis, penelitian ini memperkuat model kognitif-evaluatif-perilaku dalam psikologi politik. Efikasi politik berperan sebagai dimensi kognitif yang berkaitan dengan keyakinan warga terhadap kemampuannya memahami dan mengikuti politik. Kepercayaan institusional berperan sebagai dimensi evaluatif yang berkaitan dengan penilaian terhadap kredibilitas penyelenggara pemilu. Partisipasi pemilih berperan sebagai dimensi perilaku yang mencakup tindakan elektoral dan keterlibatan politik pasca-elektoral. Dengan menempatkan kepercayaan institusional sebagai mediator parsial, penelitian ini menunjukkan bahwa partisipasi pemilih lokal tidak hanya dibentuk oleh kemampuan individu memahami politik, tetapi juga oleh cara individu menilai integritas sistem elektoral.

Secara praktis, hasil penelitian memberi implikasi bagi penyelenggara pemilu dan pemerintah daerah. Upaya meningkatkan partisipasi pemilih tidak cukup dilakukan melalui ajakan datang ke TPS. Strategi partisipasi perlu diarahkan pada dua aspek sekaligus, yaitu memperkuat efikasi politik warga dan meningkatkan kepercayaan terhadap institusi penyelenggara pemilu. Penguatan efikasi dapat dilakukan melalui literasi politik, pendidikan pemilih, akses informasi yang mudah dipahami, serta ruang diskusi publik yang inklusif. Sementara itu, penguatan kepercayaan institusional dapat dilakukan melalui transparansi proses pemilu, penyampaian informasi yang konsisten, respons cepat terhadap disinformasi, serta keterbukaan dalam menjelaskan prosedur dan hasil pemilihan.

Meskipun demikian, temuan penelitian ini perlu ditafsirkan secara hati-hati. Pertama, desain penelitian yang bersifat korelasional potong lintang tidak memungkinkan penarikan kesimpulan kausal yang kuat. Karena itu, hubungan antara efikasi politik, kepercayaan institusional, dan partisipasi pemilih lebih tepat dipahami sebagai hubungan statistik, bukan bukti sebab-akibat. Kedua, sampel penelitian hanya mencakup responden yang telah menggunakan hak pilih pada Pilkada 2024, sehingga hasil penelitian tidak dapat digeneralisasikan secara langsung kepada warga yang tidak memilih. Ketiga, reliabilitas konstruk efikasi politik dan partisipasi pemilih berada pada kategori marginal, sehingga hasil terkait kedua konstruk tersebut perlu dibaca dengan kehati-hatian metodologis. Penelitian selanjutnya disarankan menggunakan desain longitudinal, memperluas cakupan sampel hingga mencakup pemilih dan non-pemilih, serta memperkuat pengujian validitas konstruk melalui measurement model yang lebih lengkap.

Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa efikasi politik, kepercayaan institusional, dan partisipasi pemilih memiliki hubungan positif dalam konteks demokrasi lokal pasca-Pilkada 2024. Efikasi politik berasosiasi positif dengan kepercayaan institusional dan partisipasi pemilih, sedangkan kepercayaan institusional juga berasosiasi positif dengan partisipasi pemilih. Temuan ini mendukung pandangan bahwa keterlibatan politik warga dapat dipahami melalui lintasan kognitif–evaluatif–perilaku, yaitu keyakinan warga dalam memahami politik, penilaian terhadap kredibilitas penyelenggara pemilu, dan keterlibatan dalam aktivitas elektoral maupun pasca-elektoral (Reichert, 2016; Boulianne, 2019; Mashud et al., 2023).

Hasil analisis mediasi menunjukkan bahwa kepercayaan institusional terhadap KPU berperan sebagai mediator parsial dalam hubungan antara efikasi politik dan partisipasi pemilih. Efek tidak langsung efikasi politik terhadap partisipasi pemilih melalui kepercayaan institusional signifikan secara statistik ($B = 0.11$; 95% CI [0.06, 0.17]) dengan proporsi mediasi sebesar 20.5%. Namun, efek langsung efikasi politik terhadap partisipasi pemilih tetap lebih besar, yaitu 79.5% dari hubungan total. Artinya, kepercayaan institusional merupakan salah satu jalur psikologis yang menjelaskan keterkaitan antara efikasi politik dan partisipasi pemilih, tetapi bukan satu-satunya mekanisme yang bekerja dalam model ini.

Temuan ini mengindikasikan bahwa partisipasi pemilih tidak hanya berkaitan dengan kepercayaan terhadap integritas penyelenggara pemilu, tetapi juga dengan keyakinan warga bahwa mereka mampu memahami isu politik dan mengambil bagian dalam proses demokrasi. Pemilih dengan efikasi politik yang lebih tinggi dapat tetap menunjukkan keterlibatan politik melalui pencarian informasi, diskusi politik, penggunaan hak pilih, dan intensi untuk berpartisipasi kembali, meskipun tingkat kepercayaan terhadap institusi belum sepenuhnya kuat. Dengan demikian, kepercayaan institusional terhadap KPU dapat dipahami sebagai mekanisme evaluatif yang memperkuat makna partisipasi, sementara efikasi politik tetap menjadi sumber daya psikologis yang berhubungan langsung dengan keterlibatan pemilih (Acar & Uluğ, 2022; Suryahadi et al., 2023; Wang, 2016; Devine, 2024).

Secara teoretis, penelitian ini memberi kontribusi pada kajian psikologi politik dengan menegaskan bahwa partisipasi pemilih lokal dapat dipahami sebagai hasil keterkaitan antara efikasi politik dan evaluasi terhadap institusi elektoral. Secara praktis, hasil ini memberi masukan bagi KPU dan pemerintah daerah bahwa peningkatan partisipasi pemilih perlu diarahkan pada dua aspek sekaligus, yaitu penguatan efikasi politik warga melalui literasi politik dan pendidikan pemilih, serta penguatan kepercayaan institusional melalui transparansi prosedur, komunikasi publik yang jelas, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemilu (Bakar et al., 2022; Arrazak & Adnan, 2025; Ida et al., 2025).

Meskipun demikian, hasil penelitian ini perlu ditafsirkan secara hati-hati. Desain penelitian yang bersifat korelasional potong lintang tidak memungkinkan penarikan kesimpulan kausal yang kuat. Selain itu, sampel penelitian hanya mencakup warga Kota Medan yang telah menggunakan hak pilih pada Pilkada 2024, sehingga hasilnya belum dapat digeneralisasikan kepada kelompok non-pemilih. Reliabilitas konstruk efikasi politik dan partisipasi pemilih yang berada pada kategori marginal juga perlu menjadi perhatian dalam interpretasi hasil. Penelitian selanjutnya disarankan menggunakan desain longitudinal atau eksperimental, memperluas cakupan sampel pada pemilih dan non-pemilih, serta memperkuat pengujian instrumen melalui measurement model yang lebih lengkap, termasuk factor loading, CFI, TLI, RMSEA, SRMR, AVE, dan composite reliability.

Ucapan Terima Kasih

Penulis menyampaikan terima kasih kepada seluruh partisipan yang telah bersedia mengikuti penelitian ini.

Pernyataan Etika Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan persetujuan partisipan. Partisipasi bersifat sukarela dan anonim, serta data digunakan hanya untuk kepentingan akademik.

Pernyataan Konflik Kepentingan

Penulis menyatakan tidak terdapat konflik kepentingan dalam penelitian dan penulisan artikel ini.

Daftar Pustaka

- Acar, Y. G., & Ulug, Ö. M. (2022). When and why does political trust predict well-being in authoritarian contexts? Examining the role of political efficacy and collective action among opposition voters. *British Journal of Social Psychology*, 61(3), 861–881. <https://doi.org/10.1111/bjso.12505>
- American Psychological Association. (2020). *Publication manual of the American Psychological Association (7th ed.)*. American Psychological Association. <https://doi.org/10.1037/0000165-000>
- Ardevol-Abreu, A., Diehl, T., & de Zúñiga, H. G. (2019). Antecedents of internal political efficacy: Incidental news exposure online and the mediating role of political discussion. *Politics*, 39(1), 82–100. <https://doi.org/10.1177/0263395717693251>
- Arrazak, M. A., & Adnan, M. (2025). The influence of social media usage and political trust on young voters political participation in Padang City. *Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora*, 5(1), 11. <https://doi.org/10.53697/iso.v5i1.2160>
- Bakar, D. M., Hidayat, E. R., & Malik, I. (2022). Implications of political trust, kinship politics, and political participation: Makassar City election in 2020. *Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review*, 7(1), 51–68. <https://doi.org/10.15294/ipsr.v7i1.38486>
- Bienstman, S., Hense, S., & Gangl, M. (2024). Explaining the “democratic malaise” in unequal societies: Inequality, external efficacy and political trust. *European Journal of Political Research*, 63(1), 172–191. <https://doi.org/10.1111/1475-6765.12611>
- Boulianne, S. (2019). Building faith in democracy: Deliberative events, political trust and efficacy. *Political Studies*, 67(1), 4–30. <https://doi.org/10.1177/0032321718761466>
- Chang, W.-C. (2023). Direct democracy and party membership: Testing the role of political efficacy. *Political Studies Review*, 21(1), 3–20. <https://doi.org/10.1177/14789299211034278>
- Chen, C., Bai, Y., & Wang, R. (2019). Online political efficacy and political participation: A mediation analysis based on the evidence from Taiwan. *New Media & Society*, 21(8), 1667–1696. <https://doi.org/10.1177/1461444819828718>
- Denemark, D., & Niemi, R. G. (2012). Political trust, efficacy and engagement in challenging times: An introduction. *Australian Journal of Political Science*, 47(1), 1–9. <https://doi.org/10.1080/10361146.2011.643164>
- Devine, D. (2024). Does political trust matter? A meta-analysis on the consequences of trust. *Political Behavior*, 46(4), 2241–2262. <https://doi.org/10.1007/s11109-024-09916-y>
- Etikan, I., Musa, S. A., & Alkassim, R. S. (2016). Comparison of convenience sampling and purposive sampling. *American Journal of Theoretical and Applied Statistics*, 5(1), 1–4. <https://doi.org/10.11648/j.ajtas.20160501.11>
- Easton, D. (1975). A re-assessment of the concept of political support. *British Journal of Political Science*, 5(4), 435–457. <https://doi.org/10.1017/S0007123400008309>
- Fitz, E. B., & Saunders, K. L. (2024). Distrusting the process: Electoral trust, operational ideology, and nonvoting political participation in the 2020 American electorate. *Public Opinion Quarterly*, 88(SI), 843–857. <https://doi.org/10.1093/poq/nfae025>
- Granados, C., & Sánchez, F. (2026). Should I stay or should I go? The behavioural consequences of political trust in contexts of inequality: The case of Latin America. *Journal of Politics in Latin America*, 18(1), 3–28. <https://doi.org/10.1177/1866802X251384315>
- Guan, Y. (2026). Multidimensional political trust and its effects on political activism in nondemocracies: Findings from a concept-driven clustering method. *The British Journal of Politics and International Relations*, 28(1), 306–329. <https://doi.org/10.1177/13691481251343628>
- Hair, J. F., Hult, G. T. M., Ringle, C. M., Sarstedt, M., Danks, N. P., & Ray, S. (2021). *Partial least squares structural equation modeling (PLS-SEM) using R: A workbook*. Springer. <https://doi.org/10.1007/978-3-030-80519-7>
- Hayes, A. F. (2018). *Introduction to mediation, moderation, and conditional process analysis: A regression-based approach (2nd ed.)*. Guilford Press.
- Ida, R., Mashud, M., Saud, M., Yousaf, F. N., & Ashfaq, A. (2025). Politics in Indonesia: Democracy, social networks and youth political participation. *Cogent Social Sciences*, 11(1), Article 2432071. <https://doi.org/10.1080/23311886.2024.2432071>
- Kestilä-Kekkonen, E., Koivula, A., & Tiihonen, A. (2022). When trust is not enough: A longitudinal analysis of political trust and political competence during the first wave of the COVID-19 pandemic in Finland. *European Political Science Review*, 14(3), 424–440. <https://doi.org/10.1017/S1755773922000224>
- Mashud, M., Ida, R., & Saud, M. (2023). Political discussions lead to political efficacy among students in Indonesia. *Asian Journal of Comparative Politics*, 8(1), 184–200. <https://doi.org/10.1177/20578911221143674>
- McDonnell, J. (2020). Municipality size, political efficacy and political participation: A systematic review. *Local Government Studies*, 46(3), 331–350. <https://doi.org/10.1080/03003930.2019.1600510>
- Miura, A., & Kobayashi, T. (2021). *Characteristics of participants and satisficing tendency in online surveys using a sample provider*. PsyArXiv. <https://doi.org/10.31234/osf.io/zqd5p>
- Mulyawan, W., Rifai, R., & Hidayat, R. (2024). Factors influencing first-time voters' turnout in the 2024 legislative elections: Political efficacy, campaign strategies, and financial incentives. *The International Journal of Politics and Sociology Research*, 12(2), 157–168. <https://doi.org/10.35335/ijopsor.v12i2.266>
- Niemi, R. G., Craig, S. C., & Mattei, F. (1991). Measuring internal political efficacy in the 1988 National Election Study. *American Political Science Review*, 85(4), 1407–1413. <https://doi.org/10.2307/1963953>
- Ouattara, E., & Steenvoorden, E. (2024). The elusive effect of political trust on participation: Participatory resource or (dis)incentive? *Political Studies*, 72(4), 1269–1287. <https://doi.org/10.1177/00323217231194820>
- Prahara, S. A., & Rachma, N. M. (2023). Political efficacy and political participation in Islamic association cadres. *Psikis: Jurnal Psikologi Islami*, 9(1), 170–178. <https://doi.org/10.19109/psikis.v9i1.16514>
- Preacher, K. J., & Hayes, A. F. (2008). Asymptotic and resampling strategies for assessing and comparing indirect effects in multiple mediator models. *Behavior Research Methods*, 40(3), 879–891. <https://doi.org/10.3758/BRM.40.3.879>
- Reichert, F. (2016). How internal political efficacy translates political knowledge into political participation: Evidence from Germany. *Europe's Journal of Psychology*, 12(2), 221–241. <https://doi.org/10.5964/ejop.v12i2.1095>
- Stals, L., Stiers, D., & Kern, A. (2025). Political trust and electoral behavior among 16- and 17-year-old first-time voters in Belgium. *International Journal of Public Opinion Research*, 37(3), Article edaf026. <https://doi.org/10.1093/ijpor/edaf026>
- Suryahadi, A., Al Izzati, R., Suryadarma, D., & Dartanto, T. (2023). How inequality affects trust in institutions: Evidence from Indonesia. *Asian Economic Policy Review*, 18(1), 73–91. <https://doi.org/10.1111/aep.12401>
- Suryanagara, M. I. S., Rahmatunnisa, M., Bainus, A., & Umam, A. K. (2025). Voting behavior in Asian democracies: A comprehensive synthesis of contemporary research. *Masyarakat, Kebudayaan dan Politik*, 38(2), 139–155. <https://doi.org/10.20473/mkp.V38i2.2025.139-155>
- Taber, K. S. (2018). The use of Cronbach's alpha when developing and reporting research instruments in science education. *Research in Science Education*, 48(6), 1273–1296. <https://doi.org/10.1007/s11165-016-9602-2>
- van Alebeek, C. R. A., van der Meer, T., & Hakhverdian, A. (2026). Stable or variable distrust? Disentangling the relationship between political trust and electoral behavior. *European Political Science Review*, 18(1), 87–103. <https://doi.org/10.1017/S1755773925100210>
- Wang, C., & Zhang, X. (2024). Governance capacity, social justice, and institutionalized political participation in China: A moderated mediation model. *Chinese Public Administration Review*, 15(3), 194–206. <https://doi.org/10.1177/15396754241252978>
- Wang, C. H. (2016). Political trust, civic duty and voter turnout: The mediation argument. *The Social Science Journal*, 53(3), 291–300. <https://doi.org/10.1016/j.soscij.2016.04.008>